BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan kepala daerah harus berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28A-J UUD 1945, yang menjamin hak-hak dasar, termasuk hak politik setiap warga negara. Dalam konteks Pilkada, partisipasi politik adalah esensi demokrasi, dan Indonesia menjamin hak warga negara untuk memilih. Dengan demikian, meskipun peraturan hukum telah mendukung hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaannya masih perlu penyempurnaan agar semua warga negara, tanpa kecuali, dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses demokrasi.
2. Untuk idealnya Pengaturan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam Pilkada seharusnya berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, perlu adanya norma khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas mental. Dengan demikian, pengaturan hak pilih penyandang disabilitas dapat secara efektif dipindahkan dan diintegrasikan ke dalam undang-undang disabilitas, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi penyandang disabilitas mental.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan penyelenggara Pilkada diharapkan lebih memperhatikan hak pilih penyandang disabilitas mental. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi agar lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas untuk mengurangi stigma. Rekomendasi seperti menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan memanfaatkan teknologi dalam pemungutan suara juga harus dipertimbangkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyandang disabilitas mental dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu dan menikmati hak politik yang setara.
2. Kepada pemerintah diharapkan untuk menambahkan pasal yang khusus agar lebih senkafikan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah untuk mengatur hak-hak penyandang disabilitas mental. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik. Dengan adanya penambahan pasal khusus, diharapkan akan tercipta kerangka hukum yang lebih komprehensif dan inklusif bagi penyandang disabilitas mental, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat tanpa mengalami diskriminasi.